

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik yang baik menjadi isu kebijakan strategis karena pelayanan publik sangat berimplikasi luas khususnya dalam memperbaiki kepercayaan kepada pemerintah daerah (Puspitasari dan Bandesa, 2016). Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih menjadi masalah utama yaitu belum optimalnya kinerja aparat pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang ditunjukkan dengan masih banyaknya keluhan-keluhan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah selama ini sehingga menimbulkan citra kurang baik terhadap pemerintah (Puspitasari dan Bandesa, 2016). Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Baik buruknya kinerja pemerintah daerah tidak terlepas dari kemampuan manajerial, semakin baiknya kinerja seorang manajer akan berpengaruh dengan semakin baiknya kinerja organisasi tersebut (Nugraheni, 2015). Penilaian kinerja berguna untuk memperbaiki kinerja pada masa yang akan datang. Kinerja pemerintah dinilai dari bagaimana organisasi tersebut memberikan layanan terbaik dengan mendayagunakan sumber daya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani (Mukaromah, 2018).

Tentu saja kinerja manajerial pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja manajerial pada seluruh kepala SKPD. Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan salah satu kunci keberhasilan SKPD dalam menjalankan tugasnya di pemerintah daerah, karena kinerja yang baik akan menunjukkan tata kelola pemerintah yang baik (Melia dan Sari, 2019). Penilaian terhadap kinerja manajerial SKPD menjadi hal yang sangat penting karena penilaian kinerja manajerial akan membantu mengoptimalkan organisasi sektor publik terhadap pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan guna mencapai tujuan organisasi sektor publik (Amertadewi, 2013).

Menurut Sari, dkk (2014) sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah tetap harus belajar untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Tentunya peranan manajer menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. Selain itu dengan adanya partisipasi secara luas pada proses organisasional, dimana para anggota organisasi yang dalam hal ini adalah para manajer ikut serta dan mempunyai pengaruh dalam suatu pembuatan keputusan yang berkepentingan dengan mereka. Dalam suatu SKPD yang dikatakan manajer disini yaitu beberapa kepala bagian yang mambidangi satu bidang tertentu. Kinerja dari kepala bagian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukannya (Sari, dkk 2014).

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang sukses menuai prestasi sebagai daerah berstatus kinerja sangat tinggi. Ponorogo masuk ke dalam daftar penerima penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018 (www.detiknews.com). Kinerja yang dinilai meliputi dari anggaran hingga pelayanan ke masyarakat. Selain Ponorogo, seluruh

kota/kabupaten di Jawa Timur meraih penghargaan serupa, karena Jawa Timur berhasil meraih LPPD tahun 2018 tertinggi se-Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibutuhkan kinerja manajerial untuk bisa meningkatkan kinerja dari seluruh SKPD Kabupaten Ponorogo demi kesejahteraan masyarakat.

Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 telah dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan (ponorogo.go.id). SAKIP Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019 memperoleh nilai 70,97 atau peringkat “BB”, hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan peringkat “B”. Untuk tahun 2021 Kabupaten Ponorogo menargetkan mendapatkan peringkat “A”.

Menurut Ernawilis (2015) ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab kinerja manajerial pemerintah daerah rendah diantaranya karena sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dimulai dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan/ penatausahaan APBD, pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD dan pengawasan. Dalam proses penganggaran, pemerintah daerah selalu mengalami keterlambatan dalam pengesahan perda APBD. Keterlambatan ini menyebabkan banyak program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran berjalan sehingga terjadi keterlambatan pembangunan daerah tersebut (Ernawilis, 2015). Secara umum ada tiga permasalahan dalam penyusunan anggaran yakni Ketidakefektifan penggunaan anggaran, inefisiensi dan *private inurement*

(penggunaan dana untuk kepentingan pribadi), karena ketiga aspek tersebut dapat mempengaruhi dalam hal pengambilan keputusan (Sari, dkk 2014).

Menurut Sari (2016) faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi kinerja manajerial pemerintah daerah diantaranya yaitu partisipasi anggaran, desentralisasi, akuntabilitas publik dan sistem pengendali internal. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas setiap aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstitusi lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Ernawilis, 2015). Melalui akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan (Darmawan, 2016).

Selain peningkatan kinerja, perencanaan anggaran dan kejelasan anggaran juga dianggap akan mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi dalam perencanaan keuangannya. Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Menurut Sari dkk., (2014) proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam Kepmendagri memuat pedoman penyusunan rancangan APBD yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama Unit Organisasi Perangkat Daerah (unit kerja). Pada kenyataannya di dalam penyusunan anggaran masih banyak anggaran yang belum jelas sarannya dan minimnya partisipasi yang dilakukan oleh manajer tingkat bawah mengakibatkan hal tersebut terjadi, serta banyak pula terdapat penggunaan

keuangan untuk kepentingan pribadi yang membuat para *stakeholder* khawatir jadi sangatlah penting pertanggungjawaban dan transparansi kinerja manajerial sektor publik itu sendiri (Sari, dkk, 2014).

Partisipasi anggaran merupakan proses keikutsertaan seseorang dalam penyusunan dan memutuskan anggaran secara bersama. Partisipasi anggaran dari setiap SKPD memiliki peranan penting. Masing-masing satuan kerja ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja (Wianti dan Sisdyani, 2016). Sehingga, sukses tidaknya para staff dalam suatu SKPD dalam melaksanakan anggaran merupakan suatu refleksi langsung tentang keberhasilan ataupun kegagalan manajerial SKPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya (Primadana, Yuniarta dan Adiputra, 2014).

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan, pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing (Hidayati, 2017). Selanjutnya pengawasan oleh masyarakat (sosial kontrol) diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Penelitian yang dilakukan Mukaromah (2018) yakni menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Hasil tersebut

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Melia dan Sari (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Sedangkan penelitian yang menyatakan sebaliknya yaitu Wahyuni, dkk. (2014) hasil penelitiannya membuktikan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD.

Penelitian yang dilakukan Wianti dan Sisdyani (2016) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berppengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Hasil tersebut sejalan dengan Melia dan Sari (2019) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Penelitian yang menyatakan sebaliknya yaitu Wahyuni, dkk. (2014) dan Hidayati (2017) hasil penelitiannya membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD.

Penelitian yang dilakukan Tarjono dan Nugraha (2015) menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Hidayati (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Sedangkan penelitian yang menyatakan sebaliknya yaitu Melia dan Sari (2019) hasil penelitiannya membuktikan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD.

Ketidak konsistenan peneliti-peneliti terdahulu menarik peneliti untuk meneliti lebih lanjut dalam rangka memperoleh tambahan bukti empiris atas studi terdahulu. Penelitian ini merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mukaromah (2018), perbedaan dalam penelitian ini yakni mengganti variabel bebas desentralisasi menjadi akuntabilitas.

Dari latar belakang yang telah diuraikan dan fenomena yang terjadi, Penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo)”**..

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh Terhadap Kinerja Manajerial SKPD?
2. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh Terhadap Kinerja Manajerial?
3. Apakah Partisipasi Anggaran berpengaruh Terhadap Kinerja Manajerial?
4. Apakah Pengawasan Internal mampu Memoderasi Hubungan Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Manajerial.
2. Mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial.

3. Mengetahui pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial.
4. Mengetahui pengaruh Pengawasan Internal akan Memoderasi Hubungan Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi dan referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan permasalahan kinerja manajerial SKPD di Kabupaten Ponorogo, sehingga dapat memberikan saran dan masukan pada masa yang akan datang.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat digunakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pemerintahan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja manajerialnya yang berkaitan dengan akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran dan pengawasan internal. Selain itu diharapkan Bupati selaku pimpinan pemerintahan daerah dapat menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel seperti yang diamanatkan undang-undang.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya untuk lebih memahami tentang kinerja pemerintah daerah Kabupaten

Ponorogo, serta menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam melahkukan penelitian ilmiah.

d. Bagi Penelitian yang Akan Datang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup yang serupa.

